

Judul : Tekan Harga Gas, Dewan Minta Pangkas Iuran Niaga
Tanggal : Kamis, 13 Februari 2020
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 2

Tekan Harga Gas, Dewan Minta Pangkas Iuran Niaga

JAKARTA - Komisi VII DPR RI mende- sak iuran niaga dan pengangkutan gas yang dipungut Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dihapus. Pasalnya, komponen ini bila ditekankan dapat mendukung penurunan harga gas.

Anggota Komisi VII DPR RI Naszirul Falah Amru mengatakan, iuran niaga dan pengangkutan gas bumi melalui pipa yang dipungut BPH Migas hanya me-



DPR-RI
Naszirul Falah Amru

nambah beban dalam kompo- nen pemben- tutukan harga gas, sehingga membuat harga gas bumi lebih tinggi.

"Iuran hanya menambah be- ban masyarakat buat apa," tanya Falah saat rapat dengan BPH Migas di Kom- pleks Parlemen, Senayan, Rabu (12/2).

Menurut Falah, inisiatif BPH Migas mengevaluasi tarif pengangkutan gas bumi sudah ke- bablasan. "Dia mencoba mengatur soal tarif transmisi padahal di ratas pres- iden tidak ada (arahan seperti itu, Red)," ujarnya.

Dia mengatakan, jika pemerintah ber- maksud untuk menerapkan Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2016 yang mengamanatkan penurunan harga gas bumi ditingkat konsumen menjadi 6 US dolar per MMBTU, maka sebaiknya BPH Migas tidak merubah tarif pengangkutan gas bumi.

Namun, sambung Falah, maksa- nakan sesuai dengan ketentuan yaitu, melalui pengurangan penerimaan bagian negara. Apalagi jika penetapan tarif itu dilakukan sesuai ketentuan BPH Migas, dihitung dan diverifikasi BPH Migas, dan dituangkan dalam keputusan BPH Migas. "BPH Migas jangan jauh masuk ke tarif transmisi pengangkutan, jangan terlalu masuk ke wilayah itu," tuturnya.

Sebagai lembaga yang dibiayai iuran badan usaha hilir gas bumi melalui pipa, lanjutnya, seharusnya BPH Migas men- jadi penyeimbang dalam menentukan kebijakan mengenai gas bumi.

"Seharusnya bukan menjadi corong pemerintah tapi penyeimbang. Kalau memang sebagai corong pemerintah iuran di cabut saja, kalau pun harus ada iuran sebaiknya diberikan saja kepada badan usaha sebagai insentif. Itu lebih bagus dan bijaksana," paparnya.

Sementara, Kepala BPH Migas M Fans- hurullah Asa menjelaskan, penerimaan dari iuran penyaluran gas pipa tidak signifikan. Berdasarkan catatan lem- baganya, total penerimaan dari iuran migas sebesar Rp 1,32 triliun. Dari jum- lah tersebut, iuran gas berkontribusi sebesar Rp 285 miliar atau 22 persen, sedangkan sisanya adalah kontribusi iuran minyak.

"Kalau iuran dari badan usaha gas kecil. Tadi saya sampaikan BPH dapat uang Rp 1,3 triliun, yang dari PGN Rp 107 miliar kami silakan (untuk dihapus, Red)," tukasnya. (aen)